

BAB III

**KEBIJAKAN COUNTERTERRORISM SEBAGAI FAKTOR
PENDORONG DIBUATNYA POTA (PREVENTION OF TERRORISM
ACT) DI MALAYSIA**

Pada abad ke-21 sekarang ini, dunia internasional dihadapkan pada masalahnya pada munculnya kejahatan baru yang disebabkan oleh sekelompok individu yang disebut dengan terorisme. Terorisme merupakan sebuah fenomena yang muncul menjadi ancaman bagi setiap negara, dibutuhkan keseriusan untuk melawan gerakan ini karena dapat mengancam keamanan baik itu domestik maupun internasional. Setiap negara didunia mempunyai berbagai macam cara yang digunakan untuk membendung gerakan terorisme, seperti mengeluarkan kebijakan, kebijakan dalam negeri yang bersisian tentang kiat – kiat dalam membendung atau mencegah tindak terorisme. Tidak hanya mengandalkan kebijakan dalam negeri, kebijakan yang datang dari luar negeri pun atau biasa disebut dengan kebijakan internasional bisa menjadi alternatif lain dalam memerangi gerakan terorisme. negara – negara didunia juga berkomitmen satu sama lain untuk bersama – sama bersepakat dalam melawan terorisme, dengan cara menerapkan kebijakan internasional yang dibuat oleh sebuah negara, atau organisasi internasional.

Terlibatnya sebuah negara kedalam sebuah hubungan dengan negara lain, organisasi internasional maupun regional dan sebaliknya, yang bersifat bilateral

maupun multilateral, menjadikan negara harus mengikuti alur yang sudah diterapkan oleh para partner demi untuk memperlancar kerjasama yang telah dibangun dan juga untuk mencapai kepentingan masing – masing. Terlibatnya sebuah negara dalam sebuah hubungan bilateral maupun multilateral menjadikan negara tersebut harus mengikuti aturan – aturan yang diterapkan oleh mitra kerjasamanya. Termasuk jika sebuah negara menjalin hubungan dengan negara atau organisasi yang berpengaruh dalam dunia internasional, dimana mereka memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi negara – negara dunia untuk menerapkan setiap keputusan atau kebijakan yang telah dibuat. Tak ayal jika keputusan atau kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara dilatarbelakangi oleh tekanan internasional melalui kerjasama tersebut. Tekanan internasional merupakan faktor pendorong diterapkannya sebuah kebijakan internasional disetiap negara. Kebijakan ini bisa bermacam – macam mulai dari kebijakan politik, ekonomi dan sosial budaya. Amerika Serikat dan Organisasi PBB merupakan dua *Stakeholder* yang dapat mempengaruhi tatanan global dengan kekuatan yang dimiliki.

Munculnya Amerika Serikat sebagai negara superpower menjadikannya memiliki pengaruh besar didunia internasional, ini dibuktikan dengan AS dapat menerapkan kebijakan dalam negerinya menjadi kebijakan internasional dan harus diterapkan oleh negara – negara sekutu di seluruh dunia, ini dilakukan dengan cara mengkampanyekannya melalui organisasi internasional maupun melalui forum, atau media massa. Salah satu kebijakan AS yang paling berpengaruh didunia selain Demokrasi adalah “Global War On Terror” ini merupakan

kebijakan yang dikeluarkan oleh AS pasca penyerangan WTC pada 11/9 2001 dan menjadi kebijakan yang terus diperbaharui hingga sekarang mengikuti pergerakan terorisme yang semakin ganas pada abad ini. Diterapkannya kebijakan Global War on Terror diikuti dengan dibuatnya kebijakan baru yang lebih spesifik untuk melawan gerakan terorisme, yakni Counterterrorism.

Counterterrorism adalah aktivitas dan operasi yang bertujuan untuk menetralkan teroris, organisasi, serta jaringan mereka supaya tidak bisa lagi menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ketakutan dan mengganggu kehidupan pemerintah maupun masyarakat. Operasi Counterterrorism dilakukan dengan cara membuat jaringan secara global, dengan upaya – upaya antara lain pengumpulan informasi dan analisis penguasaan kekuatan bersenjata yang biasanya menghasilkan penahanan para terduga teroris yang digunakan untuk menggali informasi serta mencegah tindakan terorisme. Dalam perkembangannya kebijakan Counterterrorism merupakan buah dari kebijakan “War on Terror” yang dicanangkan oleh Amerika Serikat. Selain menjadi pencanang kebijakan ini, AS juga berperan sebagai penasihat dan pengawas Counterterrorism oleh negara lain, serta melakukan operasi langsung Counterterrorism di negara lain. cara kerja kebijakan ini ialah dengan cara melakukan pencegahan dan penanganan tindak terorisme di dalam negeri dengan melibatkan semua aparat keamanan, seperti Polisi, lembaga penanggulangan terorisme. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa kebijakan Counterterrorism dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan mencegah aksi terorisme, para aparat berwenang dapat menggeledah,

menginterogasi dan menahan terduga teroris bahkan tanpa didasari bukti sekalipun (Soetjipto, 2015).

I. Pengaruh kebijakan Counterterrorism Amerika Serikat di Dunia Internasional

Isu terorisme bukanlah hal baru bagi AS. Isu tentang terorisme telah muncul sejak kepemimpinan presiden Ronald Reagan. Dengan kata lain isu terorisme ini sebagai pengganti era perang dingin. Pada masa pemerintahan Reagan perhatian khususpun ditujukan pada pemberantasan segala jenis tindakan yang merujuk kepada tindakan terorisme baik itu sekala regional maupun internasional. Isu terorisme yang kemudian membuat stigma tentang perang terhadap teror digunakan sebagai kedarasan untuk menakut-nakuti masyarakat, supaya pemerintah dapat menghimpun dukungan untuk program – program yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Mislanya kampanye militer diluar negeri, pengeluaran dana untuk perang , pengintian dan sebagainya.

Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 di Washington DC menjadi titik awal munculnya isu terorisme global. Dalam hal ini pemerintah AS pada saat itu dipimpin oleh presiden George W. Bush mengeluarkan suatu kebijakan baru dimana didalam kebijakan tersebut terdapat suatu ajakan atau perintah yakni untuk memerangi segala jenis tindakan terorisme dengan cara melakukan kerjasama baik secara bilateral ataupun multilateral untuk memerangi segala jenis tindak terorisme muncul sebagai ancaman baru yang mengancam keamanan nasional. Kebijakan ini dibentuk guna untuk memerangi terorisme ini dipicu karena kekhawatiran AS terhadap keamanan nasionalnya dan

kestabilan keamanan internasional. Dalam penyebarluasan kebijakan peran media massa AS memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perluasan kebijakan tersebut yakni berupaya untuk meyakinkan negara-negara di dunia untuk menjalin kerjasama dalam memerangi tindak Terorisme.

Kebijakan Counterterrorism telah dimulai pasca penyerangan 11/9 September, dunia dikejutkan dengan runtuhnya World Trade Center di New York dan Pentagon Washington DC. Serangan teroris menyebabkan ketakutan ditengah – tengah masyarakat luas, dimana sekitar 2000 orang menjadi korban dalam penyerangan tersebut. Konsekuensinya adalah AS mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri untuk melawan terorisme hampir diseluruh dunia hingga sekarang, AS memiliki aliansi terbesar untuk mengkampanyekan keamanan.

Mengutip dari Jurnal Of Governement & Politic dijelaskan bahwa ;

Counterterrorism is important measure in the foreign policy of U.S Modelski told that foreign policy is the effort of states to change the behavior other states and for implementing their own interest in international system (Kegley, 2006:58) He also mentioned that foreign folicy is the authority measures to realize their international objective

dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa kemunculan Counterterrorism sebagai sebuah kebijakan sangatlah penting bagi kebijakan luar negeri AS. Dimana sebuah kebijakan luar negeri dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah negara mempengaruhi negara lain, Ia juga mengatakan dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri digunakan untuk mengubah kebiasaan negara lain dan

mengimplementasikan kepentingannya didalam sistem internasional. Selanjutnya ialah kebijakan laur negeri harus dibuktikan dengan menjadikannya objek internasional yang digunakan oleh semua negara didunia. Dalam jurna yang sama juga disebutkan bahwa kebijakan Counterterrorism mencoba untuk menghentikan atau melumpuhkan para teroris menggunakan cara yang spesial yakni tidak menggunakan kekerasan fisik melainkan lebih kepada rehabilitasi para anggota teroris. Selain itu Counterterrorism harus memiliki kekuatan dan memiliki kerjasama yang luas dengan para intelijen, lembaga hukun yang memaksakan penerapan perjanjian, memblok pendanaan teroris (Mynardy, 2016).

Tidak hanya itu, demi untuk membuktikan keseriusannya dalam memerangi tindak terorisme, AS dengan resmi membuat sebuah forum yang di beri nama The Global Counterterrorism Forum (GCTF) yang diresmikan pada 22 September 2011. Forum ini memiliki 30 negara anggota (29 Negara dan UE) di seluruh dunia Tujuan dibentuknya forum ini adalah untuk meningkatkan kerjasama multilateral dalam menangani tindak terorisme pada abad ke-21. Ini didasari oleh keinginan AS sendiri yang ingin menciptakan keadaan dunia yang aman yang jauh dari ancaman terorisme, dimana terorisme pada abad ini telah menjadi gerakan terorisme transnasional yang mengancam kemandirian nasional negara didunia (Global Counterterrorism Forum, 2011).

II. Strategi Kebijakan Counterterrorism Amerika Serikat

Kebijakan Counterterrorism yang dikeluarkan oleh AS secara tidak langsung telah mengajak dan memaksa negara – negara didunia untuk secara bersama – sama memerangi Tindakan terorisme global. Juga jauh sebelum

peristiwa 9/11 terjadi kebijakan untuk memerangi terorisme sudah pernah dikeluarkan oleh AS sekitar tahun 1970-an. Kebijakan Counterterrorism semakin menarik perhatian negara – negara di seluruh dunia sejak AS mendapatkan serangan secara langsung oleh gerakan terorisme seperti Al – Qaeda. Fenomena ini merupakan sebuah teguran keras bagi AS dimana pasca perang dingin berakhir, AS dikenal sebagai negara yang hegemon dan mustahil bahwa AS akan memiliki musuh. Namun yang terjadi malah sebaliknya pada 11 September 2001 gedung sebagai simbol kekuatan terbesar AS di serang oleh sekelompok teroris mematahkan anggapan bahwa AS adalah negara yang hegemon (Sari, 2013).

Amerika Serikat dengan sengaja menggunakan kata “war” sebagai kata untuk menggambarkan keseriusannya dalam melawan tindak terorisme, jika kembali kepada awal dibuatnya kebijakan ini, Counterterrorism dibuat pertama kali untuk melawan gerakan terorisme Al – Qaeda. Namun juga tujuan ini digunakan juga untuk melawan gerakan – gerakan terorisme yang akan muncul dimasa depan. AS sendiri memiliki beberapa strategi Counterterrorism .

Dalam strategi nasional Counterterrorism AS, menegaskan bahwa keseriusannya dalam memberantas tindak terorisme dilakukan dengan dua upaya yakni, upaya dari dalam negeri dan juga upaya multinasional. Upaya dalam negeri yakni Dengan mengerahkan angkatan militer, inteligen dan juga menjalankan fungsi – fungsi hukum atau undang – undang, kemudian upaya multinasional yakni dijalankan dengan cara membangun mitra kerjasama dengan negara – negara didunia untuk sepakat dalam melawan tindak terorisme, mempengaruhi para pembuat keputusan didunia internasional seperti PBB yang

memilik hak tertinggi untuk menetapkan suatu kebijakan yang kemudian akan diikuti atau di gunakan oleh para negara anggota. Tidak hanya itu, AS juga membuat pangkalan – pangkalan militer diberbagai negara guna untuk menajaga keamanan dunia, selain pangkalan militer, AS juga menjalin kerjasama di bidang militer dengan negara – negara di dunia. Membendung pendanaan terorisme yang mendukungnya selama ini, membuat program jangka panjang dibawah Asisten program antiterorisme AS yakni ATA (*Antiterrorism Assistance Program*) untuk menyediakan tempat pelatihan, peralatan atau perlengkapan dan teknologi untuk melawan terorisme (State, 2011).

III. Upaya Counterterrorism Malaysia dan kerjasama yang dibangun dalam kerangka kebijakan Counterterrorism

Tindakan Terorisme menjadi perhatian global karena sangat berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri dan juga keamanan internasional. Perang melawan terorisme harus dilaksanakan. Malaysia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap terganggunya keamanan dalam negeri menyetujui semua tindakan, metode dan latihan untuk mencegah tindak terorisme dan kejahatan transnasional. Dimana keduanya telah menjadi fenomena global yang akan menjadi ancaman global, tindakan yang dilakukan oleh Malaysia untuk mencegah tindak terorisme di negaranya ialah dengan cara mengikuti keputusan internasional dibawah undang – undang yang mewajibkan setiap negara anggota untuk meratifikasi semua keputusan yang berkaitan dengan pencegahan tindak terorisme dan kejahatan transnasional. Malaysia juga berpartisipasi aktif dalam

berkontribusi/ berbagi informasi dan pengalaman di forum – forum internasional (Malaysia, 2011).

Sebagai negara yang sering menjadi tempat persembunyian para kelompok terorisme, menjadikan pemerintah Malaysia sigap dalam menghadapi masalah tersebut, terlebih lagi ketika fenomena kelompok radikal ISIS masuk ke kawasan Asia Tenggara dan menyebarkan pengaruhnya di Malaysia, masuknya kelompok ISIS ke Malaysia menjadikan kondisi keamanan dalam negeri Malaysia tidak stabil, akibat dari ketidakstabilan kondisi dalam negeri ini dapat mempengaruhi berbagai sektor yang ada di sebuah negara. Seperti sektor Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya yang bersangkutan dengan kehidupan warga negara Malaysia itu sendiri. Terganggunya keamanan dalam oleh kelompok terorisme radikal menjadikan negara ini dengan cepat mencari akar masalah dan menyelesaikannya. Salah satu cara yang digunakan oleh Malaysia untuk menjaga keamanan dalam negerinya yakni dengan cara melakukan kerjasama dengan negara lain atau organisasi – organisasi internasional dimana kerjasama ini dibuat mengingat bahwa Malaysia tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam negerinya jika hanya mengandalkan potensi – potensi yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga sangat dibutuhkan sebuah kerjasama yang akan menciptakan pemenuhan kepentingan masing - masing oleh para pihak yang terlibat. Selain itu upaya yang dilakukan Malaysia ialah menerapkan kebijakan internasional didalam negeri seperti kebijakan Counterterrorism, salah satu dampak dari adanya kerjasama yang dilakukan adalah masuknya intervensi asing melalui sebuah kebijakan yang

digunakan oleh suatu negara sebagai pedoman untuk melakukan tindakan – tindakan yang menyangkut tentang pemberantasan terorisme.

Pengalaman Malaysia tentang kelompok terorisme dan kejahatan lainnya menjadikan negara ini aktif dalam forum – forum yang dibuat untuk mencegah semua tindakan tersebut. Malaysia dikenal sebagai negara yang aktif mempromosikan tindakan anti terorismenya di forum – forum internasional.

a. Bergabung kedalam *Global Coalition to Counter – ISIS* (Koalisi Global untuk melawan ISIS)

Malaysia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk memberantas tindak terorisme, baik itu dalam lingkup dalam negeri, regional maupun global. Komitmen tersebut telah dibuktikan oleh Malaysia melalui penerapan – penerapan kebijakan internasional maupun bergabung ke dalam sebuah forum regional maupun global yang berkaitan dengan pemberantasan tindak terorisme.

Kini dunia internasional digegerkan oleh kelompok terorisme *Islamic State of Irak and Syiria* (ISIS) yang telah menjelma menjadi sebuah kelompok radikal Islam yang sangat berbahaya karena tindakan yang ditimbulkan oleh gerakan ini, gerakan ini menyebut dirinya sebagai sebuah kelompok yang ingin menciptakan negara islam (*Khilafah Islamiyah*) didunia. Namun gerakan ini sangat menyimpang dari ajaran dasar Islam dan tujuan awalnya , tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini merupakan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh sebuah

kelompok yang ingin membentuk sebuah negara Islam didunia. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini sangat melanggar hak asasi manusia dan kekerasan terhadap hukum internasional, termasuk pembunuhan tanpa pandang bulu, menjadikan warga sipil sebagai target kejahatan, mengeksekusi massa, penyiksaan terhadap individu dan masyarakat berdasarkan identitas mereka, penculikan warga sipil, dan masih banyak lagi tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Kelompok ini tidak hanya menjadi ancaman di Irak dan Suriah melainkan ia menjelma menjadi sebuah ancaman yang mengancam setiap individu dan masyarakat global. ISIS menunjukkan sebuah ancaman teroris global dimana mereka merekrut ribuan anggota dari luar Irak dan Suriah, mereka bersedia menjadi anggota tetap ISIS dan membantu kelompok ini dalam melancarkan aksinya dengan cara memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan ideologi mereka dan menimbulkan tindakan teror. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini menjadikan negara didunia untuk waspada dan bergabung kedalam satu – kesatuan global untuk melawan kelompok ini.

Negara – negara yang merasa terancam oleh pengaruh yang diberikan oleh gerakan ini kemudian melakukan kolaborasi bersama untuk membendung kelompok teroris ini. Merujuk kepada resolusi 2170 Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa;

“terrorism can only be defeated by a sustained and comprehensive approach involving the active participation and collaboration of all states.... which is why our first priority to encourage others to join in this endeavor”

Menurut pernyataan Dewan Keamanan PBB diatas dapat dilihat bahwa kelompok teroris hanya dapat dikalahkan dengan cara membuat suatu pendekatan yang menyeluruh dan dukungan dengan cara melakukan kerjasama / kolaborasi, dan menekankan kepada keikutsertaan setiap negara didunia untuk bergabung kedalam sebuah kolaborasi ini, dimana prioritas utama dalam hal ini ialah mendorong setiap negara lain yang belum bergabung untuk segera bergabung dalam gagasan ini.

Pernyataan diatas merupakan sebuah patokan yang digunakan oleh negara – negara didunia untuk membentuk sebuah kolaborasi/ koalisi global dalam melawan kelompok terorisme. Seperti sebuah koalisi global yang dibentuk oleh AS, dimana forum ini bertujuan untuk melawan kelompok teroris ISIS yang disebut sebagai *“The Global Coalition to Counter ISIS”*. forum ini dibentuk pada 10 September 2014, Barack Obama meluncurkan sebuah formasi koalisi internasional untuk melawan tekanan yang diberikan oleh kelompok *Islamic State of Irak and Syiria* (ISIS). koalisi global ini memiliki 66 patner negara termasuk didalamnya negara Malaysia yang telah sepakat untuk menghilangkan ancaman yang disebabkan oleh ISIS dan negara – negara tersbut juga telah siap untuk berkontribusi dalam berbagai kapasitas dalam upaya untuk melawan ISIS.

Ada 5 hal yang paling ditekankan dalam koalisi global ini yakni

1. Memberikan dukungan militer untuk para rekan koalisi
2. Menghentikan aliran dana dari pajuang asing
3. Menghentikan keuangan dan pendanaan ISIS
4. Ditujukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di sebuah wilayah dan
5. Membongkar siapa ISIS yang sebenarnya

Adanya sebuah koalisi global seperti ini sangat penting guna untuk melawan kelompok seperti ISIS, dimana setiap rekan koalisi berkontribusi dalam dalam bidang Militer yakni mendukung persenjataan, perlengkapan, pelatihan dan juga masukan berupa saran dan nasehat. Koalisi ini juga berupaya untuk menjatuhkan dan pada akhirnya untuk melawan ISIS dengan berbagai usaha yang dilakukan termasuk mencegah aliran pendanaan ISIS dari luar negeri dan juga menunjukkan siapa sebenarnya ISIS. (State, The Global Coalition To Counter ISIS, 2014)

Bergabungnya Malaysia kedalam koalisi global ini telah membuktikan bahwa negara ini benar – benar ingin melawan kelompok ISIS baik itu didalam negerinya maupun dalam lingkup global.

b. Koalisi Militer untuk Melawan ISIS

Arab Saudi merupakan pengagas ide awal dibentuknya koalisi militer untuk melawan ISIS, keputusan ini diumumkan langsung oleh pangeran Muhammad bin Salman Al – Saud yakni pangeran Arab Saudi

sekaligus menjabat sebagai menteri pertahanan kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 34 negara bergabung dalam koalisi ini, aliansi ini terdiri dari berbagai negara yang berada dalam dunia Islam, yang berkomitmen menyangkut negaranya sendiri kemudian berdampak pada dunia. Dalam ketentuannya, koalisi ini bertujuan untuk menjalankan ketentuan yang dikeluarkan oleh PBB dan OKI dalam hal terorisme, yakni kedua lembaga tersebut menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan diri.

Koalisi ini beranggotakan 34 negara diantaranya; Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, SierraLeone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria dan Yaman. Negar – negara tersebut telah memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi, yang berpusat di Riyadh untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer. Tujuan dibentuknya koalisi ini ialah untuk melindungi negara Islam dari kejahatan terorisme dan juga tindakan – tindakan lain yang dapat mengancam keamanan negara Islam. Setiap negara anggota berhak mengirimkan bantuan militer bagi negara anggota yang sedang membutuhkannya guna untuk melawan gerakan ISIS (Muhaimin, Dipimpin Saudi, 34 negara Bentuk Koalisi Islam Melawan Teroris, 2015).

c. Kerjasama Antara AS – Malaysia

Hubungan kerjasama antara Malaysia – AS telah dimulai sejak tahun 1957, pasca Malaysia merdeka dari Inggris. Pasca pada tahun 2014 presiden Barack Obama dan perdana menteri Datuk Seri Najib Razak berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama yang komprehensif. Kini Malaysia merupakan rekan kerjasama regional dan global AS. Kerjasama ini terus berlanjut dan dikembangkan keberbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan & kebudayaan, keamanan, politik. Malaysia yang menganut sistem demokrasi yang beragam dan merupakan mitra penting dalam keterlibatan AS di Asia Tenggara (My.usembassy.gov, 2012). Kedua negara membangun kerjasama yang erat terutama dalam bidang keamanan salah satunya ialah memerangi tindak terorisme, kestabilan keamanan regional dan juga kunjungan antara kedua negara jika kerap kali dilakukan (My.usembassy.gov, 2012)

Selain itu, AS juga kerap mengirim bantuan untuk Malaysia seperti dalam bidang Pendidikan dan Budaya ; melakukan pertukaran pelajar, pertukaran warisan budaya. Kemudian dalam bidang militer, AS memberikan bantuan berupa perlengkapan senjata yang diberikan kepada para militer Malaysia untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan militer negara tersebut. AS telah berkomitmen untuk terus membantu militer Malaysia, seperti meningkatkan kemampuan dalam hal menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, menjada perdamaian, keamanan maritim dan juga kontra terorisme. (Syelvia, 2013)

Upaya Counterterrorism yang dilakukan oleh Malaysia untuk melawan kelompok terorisme radikal yang berada di negaranya khususnya ISIS ialah dengan cara fokus terhadap mengurangi ancaman yang diberikan oleh kelompok ini dan kelompok – kelompok teroris lainnya. Selain itu upaya yang dilakukan yakni dengan cara menyampaikan dan mengimplementasi sebuah kebijakan baru dan menindak lanjuti hukum – hukum yang lainnya.

Perdana menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan bahwa pada september 2015 lalu Malaysia bergabung kedalam sebuah koalisis global yakni “Leader’s Summit on Countering ISIL and Violent Extermism” yang dipimpin langsung oleh presiden AS yakni Barack Obama yang diselenggarakan di New York. Alasan mengapa Malaysia bergabung kedalam koalisi ini dikarenakan pemerintah Malaysia telah mengidentifikasi 75 warga negaranya, termasuk 14 perempuan didalamnya bergabung dengan kelompok terorisme ISIS 51 orang diantaranya telah menjadi anggota pejuang tetap ISIS dan pada akhir tahun ini pemerintah Malaysia mengidentifikasi 14 orang warga negaranya telah dibunuh oleh ISIS dan 7 diantaranya telah kembali ke Malaysia (Selamat, 2016).

Kerjasama yang dilakukan antara Malaysia – AS dalam kerangka kebijakan Counterterrorism akan semakin ditingkatkan mengingat ancaman – ancaman yang ditimbulkan oleh para kelompok terorisme, sehingga Malaysia memperkuat kerjasamanya dengan Amerika Serikat

dalam kerangka kebijakan Counterterrorism. Keseriusan kedua negara ini untuk mencegah tindak terorisme dan menjaga keamanan global dibuktikan dengan berkunjungnya Presiden Barack Obama ke Malaysia pada bulan November 2015 untuk “East Asia Summit and Related Meeting” selama melakukan kunjungan presiden Obama berkomitmen bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mendukung penuh pemerintahan Malaysia dalam meningkatkan usahanya dalam mencegah tindak terorisme (Selamat, 2016). Kemudian untuk menindak lanjuti komitmen yang dibuat oleh AS, Malaysia yang diwakili oleh menteri dalam negeri yakni Zahid berkunjung ke Washington DC pada bulan Oktober, dimana ia dan Sekertaris negara AS yang di wakili oleh Kerry menandatangani sebuah daftar terorisme – membagikan perjanjian yang merujuk kepada *Homeland Security Presidential Directive – 6*. Perjanjian ini ditanda tangani untuk jangka panjang, meliputi banyak hal, sistematis yakni saling bertukar informasi yang didapat oleh masing – masing pihak tentang para teroris. Selain itu, sumbangan AS kepada Malaysia.

d. Kerjasama Malaysia – Indonesia

Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang sangat berdekatan jika dilihat dari segi geografi, kedua negara ini memiliki kemiripan Budaya dan Bahasa. Indonesia merupakan rekan kerjasama bagi Malaysia sejak dahulu, adapun kerjasama yang mereka bangun baik itu dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan dan keamanan. selain karena faktor geografi kedua negara ini merupakan pendiri

organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yakni *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) Oleh karena itu negara ini kerap melakukan kerjasama baik itu secara bilateral maupun multilateral. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini ialah kerjasama dalam bidang keamanan.

Keamanan merupakan hal yang vital bagi sebuah negara, setiap negara berusaha untuk tetap menjaga keamanan negaranya dengan tujuan untuk melindungi semua aset yang ada didalamnya termasuk warga negaranya. Selain itu terjaganya keamanan dari gangguan kejahatan yang ditimbulkan oleh individu maupun kelompok akan menciptakan kestabilan global. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan salah satunya seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Malaysia melakukan kerjasama dalam bidang keamanan mengingat bahwa negara ini kerap kali dijadikan sebagai tempat transit para terorisme global salah satunya seperti *Islamic State Of Irak and Syiria* (ISIS), tidak hanya terorisme global ada beberapa kelompok terorisme yang bersarang di Malaysia dan mengganggu keamanan dalam negeri. Hal ini sangat berkaitan dengan sistem keamanan negara ini yang lemah dalam bidang pemeriksaan dokumen di daerah perbatasan, bandara dan tempat – tempat umum lainnya. Meskipun militer negara ini cukup kuat karena dilatih dan diperkikasi senjata oleh Inggris tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa negara ini aman dari tindakan terorisme (Rahasia Kekuatan Militer Malaysia, 2016). terbukti dengan

masuknya pengaruh ISIS kedalam negara ini dan mengganggu stabilitas keamanan dalam negerinya.

Dikawasan Asia Tenggara ISIS menyebarluaskan pengaruhnya di dua negara yang Mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni Malaysia dan Indonesia. Eksistensi pengaruh ISIS di kawasan ini terbilang aktif dimana Indonesia menjadi target dan merupakan korban pengeboman. Malaysia memang tidak mengalami kasus berupa pengeboman di negaranya namun ancaman lain datang yakni para warga negara Malaysia yang berangkat ke Suriah dan menjadi anggota ISIS disana.

Adapun tindakan yang ditimbulkan oleh kelompok ini menjadikan kedua negara tersebut sepakat untuk menjalin sebuah kerjasama yang berguna untuk menghentikan penyebaran pengaruh dan tindakan yang ditimbulkan oleh ISIS. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini ialah untuk menjaga keamanan dalam negeri masing – masing negara dan juga menjaga kewanaman regional dan global.

Indonesia memiliki catatan panjang mengenai terorisme dimana negara ini kerap kali menjadi korban pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris terhitung sejak Pasca serangan 9/11 dalam perang melawan terorisme Indonesia sempat dikatakan menjadi sarang teroris. pada Bom Bali yang merenggut banyak korban, aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang disinyalir kepanjangan tangan dari Al – Qaeda Afghanistan. Setelah hampir satu dekade lebih Indonesia kembali

digegekerkan dengan serangan bom bunuh diri yang dilakukan disalah satu daerah metropolitan di Jakarta. (Ibrahim, 2016) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa Indonesia diserang oleh kelompok teroris yakni pertama ialah lemahnya kontrol pemerintah dan ketidaksatbilan sosial – politik selain itu faktor selanjutnya ialah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah aksi terorisme di negaranya, seperti yang paling terkenal ialah dibentuknya Densus 88 yang memiliki tugas untuk terjun langsung menangkap para terduga teroris, selain itu pemerintah Indonesia juga membuat sebuah lembaga yang khusus menangani tentang tindak terorisme yakni Badan Penanggulangan Tindak Terorisme (BNPT) lembaga yang berfungsi sebagai alat untuk penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. (BNPTRI, 2016).

Dilatarbelakangi dengan kasus yang sama dan dengan musuh yang sama Malaysia dan Indonesia berkomitmen untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mencegah tindak terorisme di dalam negeri masing - masing maupun di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini ditujukan untuk kelompok ISIS yang semakin eksis melebarkan sayapnya ke semua penjuru di dunia khususnya dikawasan Asia Tenggara. kerjasama ini juga didorong oleh faktor kerangka kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN yang membahas tentang kebijakan Counterterrorism. Dibawah kerangka kebijakan Counterterrorism yang dikeluarkan ASEAN , Indonesia dan

Malaysia melakukan kerjasama yakni dengan cara saling bertukar informasi dan pengawasan terhadap pergerakan ISIS. khususnya pengawasan terhadap jejaring sosial. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara untuk melawan ISIS. selain itu upaya yang dilakukan oleh kedua negara ini yakni menyatukan persepsi negara – negara anggota ASEAN untuk bergabung menjadi satu – kesatuan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Selain menghimbau negara anggota ASEAN untuk bergabung kedalam kerjasama yang dibangun, Malaysia memiliki cara lain juga untuk membendung gerakan kelompok terorisme yakni dengan membentuk sebuah pasukan penjaga perdamaian.

Kerjasama antara kedua negara ini sangat diperlukan mengingat bahwa kedua negara ini merupakan target penyerangan ISIS. kelompok ini telah merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa akan berperang melawan kedua negara tersebut. Selain itu alasan yang sangat mendukung kerjasama antara kedua negara yakni, Malaysia dapat belajar dari pengalaman Indonesia yang sering mengalami kejadian teror.